

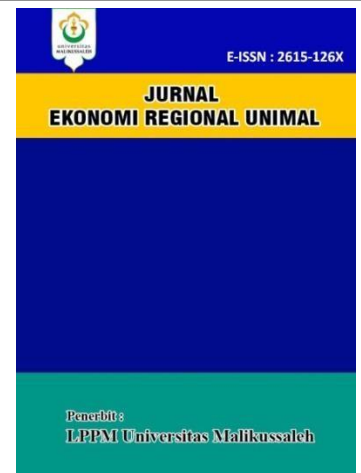
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, PAJAK DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PDRB DI PROVINSI SUMATERA BARAT

^{*a}Delvia Afferina ^{*b}Ratna Husein ^{*c}Mutia Rahmah ^{*d}Murtala

^{*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Corresponding author:

b ratna@unimal.ac.id



ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Keywords:

GRDP, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Tax, Regional Expenditure

This study aims to examine the effect of general allocation funds, special allocation funds, local taxes, and local expenditures on GRDP. This study uses a combination of cross-sectional data with time series on 19 districts and cities in West Sumatra Province during 2017-2021. The data analysis method used is panel data regression with the help of Eviews 10. The results of this study prove that the General Allocation Fund has a negative and significant effect on GRDP. The Special Allocation Fund, Regional Taxes, and Regional Expenditures have a positive and significant effect on GRDP. The magnitude of the influence of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Taxes, and Regional Expenditure on GRDP is 99.89%, and the remaining 0.10% is influenced by other variables outside this model. It is recommended to the district and city governments in West Sumatra Province to be able to realize general allocation funds, special allocation funds, local taxes, and regional expenditures properly so that the economy in West Sumatra is stable and the welfare of the community increases.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Talangamin et al, (2019) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi.

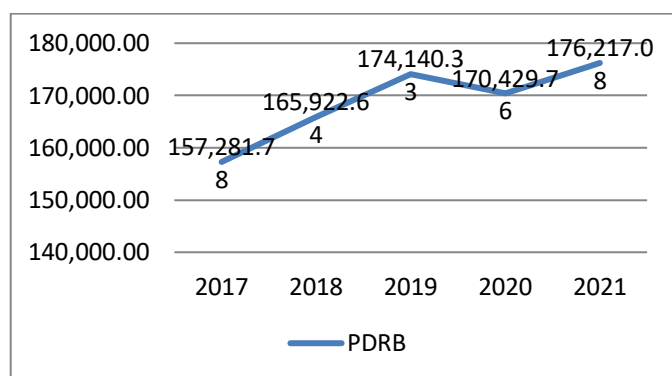
Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang mana pendapatannya masih rendah

sehingga pemerintah perlu menitik beratkan prioritas pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini tidak merata, hal ini terbukti dari besarnya ketimpangan antar daerah di Indonesia yang masih terus terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2019), distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera sebesar 80% dari total PDB Nasional. Hal ini mengindikasikan kurang meratanya pembangunan yang terjadi di Indonesia. Jika ini terus terjadi maka akan mengakibatkan ketimpangan antar daerah yang semakin besar.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang dibagi menjadi 12 kabupaten dan 7 kota. Perbedaan karakteristik dari

kabupaten/kota dilihat dari letak geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki, masing-masing wilayah kabupaten/kota mempunyai pengaruh yang kuat terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan kareakteristik dari kabupaten/kota menyebabkan terjadinya pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam (Rhamedia, 2022).

Dibawah ini merupakan PDRB Sumatera Barat tahun 2017-2021 :



Sumber: BPS Sumtra Barat, Data Diolah (2024)

Gambar 1 PDRB Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021(Juta)

Dari gambar di atas terlihat bahwa PDRB Kabupaten/Kota Sumbar juga mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Status GRP tertinggi terdapat di Kota Padang yang memiliki rata-rata GRP sebesar Rp43.014,79. setara selama lima tahun. Dan yang terparah pada rata-rata PDRB Padang Panjang dalam 5 tahun sebesar Rp 2.502,60. Tingginya PDRB Padang didukung oleh sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan.

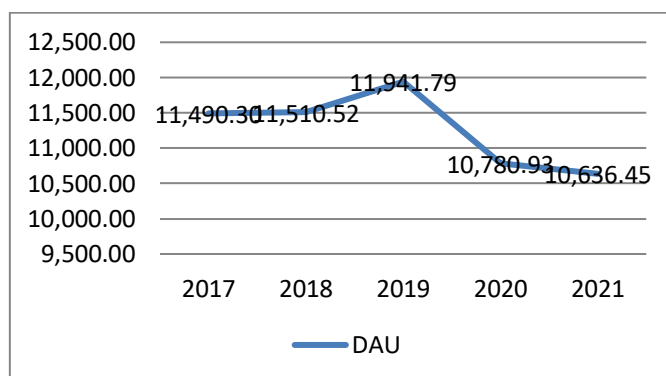
Tingkat PDRB menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong PDRB adalah dengan meningkatkan dana perimbangan. Dana perimbangan yang diberikan kepada daerah terdiri

atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Murtala & Iskandar, 2020).

Dana Alokasi Umum begitu besar sehingga merupakan sumber pendapatan terpenting bagi semua pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan APBN nya. Oleh karena itu Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai tanggapan pemerintah terhadap keinginan daerah untuk lebih mengontrol keuangan publik (Halim, 2002) dalam (Hanif Fuady & Weriantoni, 2023).

Berikut grafik data dana alokasi umum Provinsi Sumatera Barat:



Sumber: kemenkeu, data diolah 2024

Gambar 2 Dana Alokasi Umum kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021(Miliar)

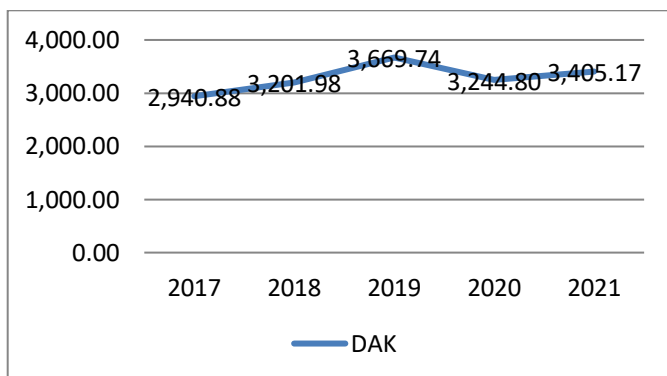
Berdasarkan gambar diatas terlihat Kota Padang mempunyai Dana Alokasi Umum tertinggi selama 5 tahun terakhir pada tahun 2017-2021, dimana pada tahun 2017 sebesar Rp 1.100,37,- pada tahun 2018 sebesar Rp 1.100.37,- pada tahun 2019 sebesar Rp 1.176,32,- pada tahun 2020 sebesar Rp 1.061.39,- pada tahun 2021 sebesar Rp 1.044.87,- dan yang terendah terdapat di Sawah Lunto yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 375.13,- pada tahun 2018 sebesar Rp 375.1,- pada tahun 2019 sebesar Rp 390,09,- pada tahun 2020 sebesar Rp 347,50,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp 341,39,-. Perbedaan anggaran tahunan tersebut dapat disimpulkan bahwa prioritas daerah berbeda-beda.

Menurut Rasu et al., (2019) dalam (Nugraha &

Soebagyo, 2021) Selain Dana Alokasi Umum (DAU), ada Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dan DAK tidak dapat dipisahkan, dengan arti bahwa mempunyai fungsi yang sama. Tetapi ditujukan kepada daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus dan dijadikan sebagai prioritas nasional. Penggunaan anggaran DAK ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk pengeluaran belanja.

Pada dasarnya DAK digunakan dalam memberikan biaya dalam pembiayaan khusus beberapa pada sektor daerah serta berdasarkan oleh prioritas negara, terutama dalam memberikan biaya keperluan fasilitas layanan standar tertentu dalam mempercepat pembangunan daerah (Derise 2008) dalam (Fitriani & Hendaris, 2023).

Berikut grafik DAK Provinsi Sumatera Barat



Sumber: kemenkeu, data diolah 2024

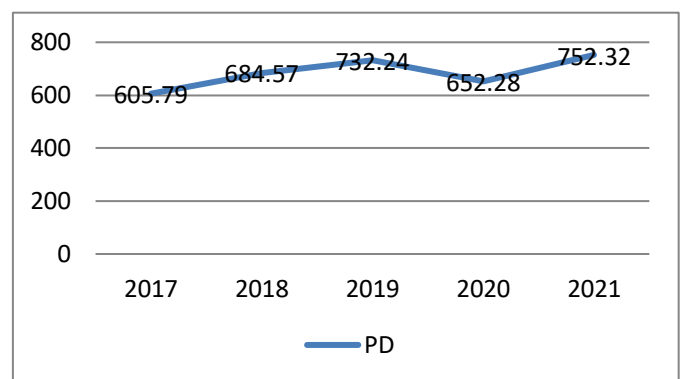
Gambar 3 Tingkat DAK Sumatera Barat 2017-2021 (Miliar)

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa Pesisir Selatan menempati posisi tertinggi dana alokasi khusus selama 5 tahun terakhir di tahun 2017-2021 dimana tahun 2017 sebesar Rp 251,06,- 2018 sebesar Rp 265,16,- 2019 sebesar Rp 335,37,- 2020 sebesar Rp 310,42,- 2021 sebesar Rp 315,55,- dan yang terendah berada di Kota Padang Panjang yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 53,11,- tahun 2018 sebesar Rp 57,42,- tahun 2019 sebesar Rp 54,86,- tahun 2020 sebesar Rp 51,34,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp 54,84,-. Dapat disimpulkan

bahwa perbedaan anggaran setiap tahunnya yang dikarenakan prioritas daerah yang berbeda beda.

PDRB tidak hanya mengukur tingkat output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan Pendapatan (Miswar et al., 2021). Pendapatan dapat berupa dana yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai kegiatannya. Pendapatan daerah tersebut dapat melalui pajak daerah (Made et al., 2020). Provinsi Sumatera Barat dituntut agar mampu mengalokasikan hasil pajak yang diterima sampai kepada penciptaan masyarakat yang adil, makmur, dan merata seperti Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Mina & Ratna, 2020)

Berikut data pajak daerah provinsi Sumatera Bara



Sumber : Kemenkeu (data diolah), 2024

Gambar 4 Tingkat Pajak Daerah Sumatera Barat 2017-2021 (Miliar)

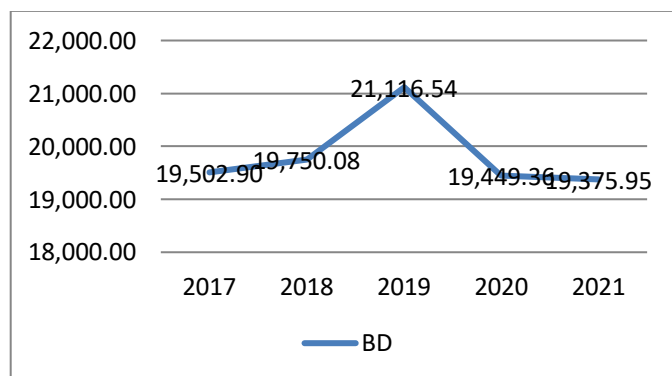
Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui terlihat di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pajak Daerah mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari tahun 2017-ke 2018 yaitu Rp 605,79,- hingga Rp 684,57,- tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 732,24,-. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan pajak hotel serta yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak Sumatera Barat yaitu pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan pajak meningkat. Jika dikaitkan dengan data PDRB Sumatera Barat juga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 yang berarti peningkatan Pajak Daerah

diikuti oleh pertumbuhan PDRB.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Besar kecilnya Belanja Daerah di sebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yang mana apabila faktor tersebut di kelola dengan baik maka akan meningkatkan Belanja Daerah dan apabila Belanja Daerah meningkat maka kebutuhan akan kepentingan daerah juga akan meningkat serta membuat perekonomian menjadi lebih baik. (Putri et al, 2021).

Berikut data perkembangan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat :



Sumber : Kemenkeu (data diolah), 2024

Gambar 1 Tingkat Belanja Daerah Sumatera Barat 2017-2021 (Miliar)

Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa jumlah Belanja Daerah mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2018 yaitu Rp 19.502,90,- hingga 19.750,08,- tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 21.116,54,-. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya belanja modal dan belanja barang dan jasa di Provinsi Sumatera Barat . Jika dikaitkan dengan data PDRB Sumatera Barat juga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 yang berarti peningkatan Belanja Daerah diikuti oleh pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan pemilihan variabel-variabel penelitian

diasas yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat diharapkan pemerintah dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut (Islami & Nababan, 2020). Sehingga dapat mempengaruhi PDRB di Provinsi Sumatera Barat.

Sehingga dapat mempengaruhi PDRB di Provinsi Sumatera Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (Mudji & Taripar, 2018).

PDRB adalah nilai pasar dari semua produk dan jasa akhir yang dikembangkan atau diproduksi di dalam perbatasan suatu negara dalam periode akuntansi tertentu, terlepas dari apakah produsennya adalah warga negara atau warga negara asing. Dengan menggunakan metodologi produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang diberikan baik pada harga pasar maupun harga konstan (riil) (Suranto, 2023).

Produk Domestik Bruto adalah penghasilan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu yang berupa nilai barang atau jasa yang berasal dari faktor – faktor produksi dari negaranya ataupun dari penduduk negara lain. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai jasa dan barang yang diproduksi di suatu regional tertentu dengan kurun waktu yang telah ditentukan, biasanya satu tahun (Reza & Sopiana, 2023)

Dana Alokasi Umum

Menurut Syahidin & Abd. Jalil, (2020) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan daerah yang bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Modal

suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Menurut Sembiring, (2019) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

Menurut Nisa, (2017) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (BPKAD).

Menurut Hartitik, (2014) Dana Alokasi Khusus Adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional

Pajak Daerah

Menurut Hasbullah (2015) dalam (Simanjuntak & Ginting, 2019), pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Siahaan (2013) dalam (Miswar *et al.*, 2021) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan daerah kepada orang perseorangan atau badan tanpa imbalan langsung langsung, yang dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan daerah. pemerintahan dan pembangunan daerah.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Kemenkeu).

Belanja daerah Lontaan dkk, (2016) dalam (Fathiyah *et al.*, 2021) merupakan Beban belanja daerah yang terdistribusi secara adil dan merata, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik, sehingga relatif memberikan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Hubungan Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

1. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap PDRB

Salah satu dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Merupakan pendanaan dari APBN yang dialokasikan dalam rangka pemerataan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer yang signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada warganya dan meningkatkan produk nasional bruto.(Murti *et al.*, 2021).

2. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan dasar sarana dan prasarana masyarakat yang belum memenuhi standar tertentu untuk mendorong pembangunan daerah. Layanan dasar tersebut meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga kerja produktif, dan meningkatkan kegunaan faktor-faktor produksi seperti penggunaan modal

dan pengelolaan lahan, yang juga meningkatkan PDRB. (Karina, 2019).

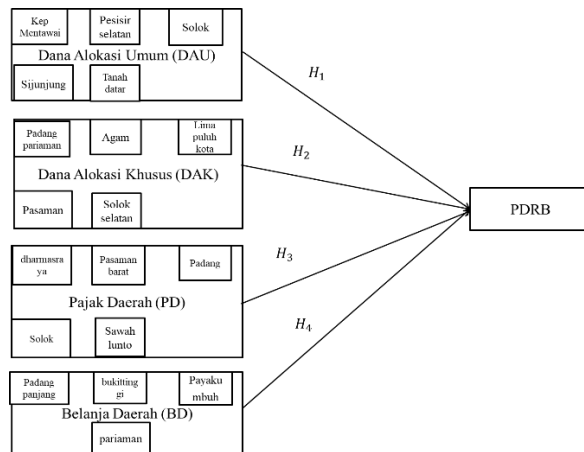
3. Hubungan Antara Pajak Daerah dengan PDRB

peningkatan pajak daerah karena partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembayaran pajak daerah dan aktifnya pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah, adanya target pajak baru seperti pajak bumi dan bangunan daerah dan pajak bangunan (PBB-P2). Hal ini meningkatkan penerimaan pajak daerah yang kemudian digunakan untuk kegiatan produksi dan menghasilkan output berupa barang dan jasa sehingga meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) (Mutiar, 2015).

4. Hubungan Antara Belanja Daerah dengan PDRB

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunandiharapkan dapat meningkatkan nilai PDRB. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang diambil pemerintah. Ketikapemerintah menetapkan kebijakan pembelian barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin banyak pula kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan

Kerangka Konseptual



Gambar Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran teoritis di atas, hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut.

- H1 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H2 : Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H3 : Diduga Pajak Daerah berpengaruh Positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H4 : Diduga Belanja Daerah berpengaruh Positif terhadap PDRB kabupaten/ kota di Sumatera Barat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan. Data yang dikumpulkan disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Datanya berupa data panel yang menggabungkan data cross-sectional dan time series pada 19 objek kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 hingga 2021.

Pengumpulan Data

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari website publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

dan Kementerian Keuangan, dengan mengumpulkan data dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pajak daerah, belanja daerah dan PDRB.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Menurut Gujarati (2003), data panel merupakan gabungan dua data, yaitu data time series dan data cross-sectional, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data dalam suatu penelitian. Oleh karena itu diperoleh persamaan model penelitian ini sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 PD_{it} + \beta_4 BD_{it} + \varepsilon_{it}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98° 36'-101° 53' Bujur Timur dan 0° 54' Lintang Utara sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan, dengan luas daratan ±42.297,30 Km² dan luas perairan (laut) ± 186.580 km² dengan panjang garis pantai wilayah daratan lebih kurang 375 Km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai lebih kurang 1.003 sehingga total garis pantai keseluruhan lebih kurang 1.378 Km. Perairan laut ini memiliki 375 pulau-pulau besar dan kecil.

Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) yang mempunyai 179 Kecamatan dengan 1.160 Kelurahan/Nagari, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Tabel 1
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	111.067729	(18,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	319.126521	18	0.0000

Sumber : hasil olah data (2024)

Berdasarkan gambar diatas diperoleh hasil dari Redundant *Fixed Effect Test* diperoleh nilai probabilitas Chi-Square < α 5% yaitu 0,0000 < 0,05. Berarti *fixed effect* model lebih baik digunakan dari pada *common effect* model dilihat berdasarkan dari hasil pengujian ini, karena yang terpilih FEM, maka bisa dilanjutkan ke REM

Tabel 2
Hasil Hausmant

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	102.605787	4	0.0000

Sumber : Eviews 10 (2023)

di atas diperoleh hasil dari Hausmant Test diperoleh nilai probabilitas Chi-Square < α 5% yaitu 0,0000 < 0,05. Berarti *fixed effect* model lebih baik dan sesuai digunakan dari pada *random effect* model dilihat berdasarkan dari hasil pengujian ini. Model ini model paling baik sehingga tidak perlu dilanjutkan uji *lagrange multiplier*

Analisis Data Panel

Tabel 3
Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7810.009	700.8626	11.14342	0.0000
DAU	-6.463323	1.370223	-4.716986	0.0000
DAK	11.38147	1.919555	5.929222	0.0000
PD	57.98976	6.012232	9.645296	0.0000
BD	0.824323	0.915402	0.900504	0.3709

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999211	F-statistic		4145.230
Adjusted R-squared	0.998970	Prob(F-statistic)		0.000000
		Durbin-Watson stat		1.710911

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat diperoleh persamaan hasil regresi sebagai berikut :

$$PDRB_{it} = 7.810,009 - 6,463DAU_{it} + 11,381DAK_{it} + 57,989PD_{it} + 0,824BD_{it}$$

Nilai konstanta dari hasil regresi diatas sebesar Rp 7.810,009,- yang artinya apabila variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat bernilai konstan (tetap) maka PDRB di 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat akan bernilai konstan sebesar Rp 7.810,009,-.

Nilai koefisien Dana alokasi umum sebesar Rp - 6,463,- yang artinya apabila Dana alokasi umum kabupaten/kota di Provisi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar Rp 1,- maka akan menurunkan PDRB di 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat sebesar Rp -6,463,- dengan asumsi variabel Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah dan Belanja Daerah dianggap tetap (konstan).

Nilai koefisien Dana alokasi Khusus sebesar Rp 11,381,- artinya apabila Dana alokasi khusus kabupaten/kota di Provisi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar Rp 1,- maka akan meningkatkan PDRB di 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 11,381,- dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah dan Belanja Daerah dianggap tetap (konstan).

Nilai koefisien Pajak Daerah sebesar Rp 57,989,- artinya apabila Pajak Daerah kabupaten/kota di Provisi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar Rp 1,- maka akan meningkatkan PDRB di 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 57,989,- dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah dianggap tetap (konstan).

Nilai koefisien Belanja Daerah sebesar Rp 0,824,- yang artinya apabila Belanja Daerah /kota di Provisi Sumatera

Barat mengalami peningkatan sebesar Rp 1,- maka akan meningkatkan PDRB di 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 0,824,- dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pajak Daerah dianggap tetap (konstan)

Hasil Uji Parsial (uji t)

Dilihat dari Tabel 3 diperoleh t hitung Dana Alokasi Umum yaitu $-4,716 < -2,632$ atau $4,716 > 2,632$, artinya bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap PDRB pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Bisa dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,01$.

Variabel selanjutnya Dana Alokasi Khusus yaitu 5,929 lebih besar dari t tabel yaitu 2,632 artinya bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif dan signifikan terhadap PDRB pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Bisa dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,01$.

Kemudian Pajak Daerah yaitu 9,645 lebih besar dari t tabel yaitu 2,632 artinya bahwa Pajak Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap PDRB pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Bisa dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,01$.

Terakhir Belanja Daerah yaitu 0.901 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,662 artinya bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Bisa dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0.3709 > 0,1$.

Hasil Uji Simultan(uji f)

Dilihat dari Tabel 3 bahwa nilai F statistik $> F$ tabel yaitu $4,145 > 3,53$ dengan probabilitas sebesar $0.000000 < 0,01$ artinya bahwa secara serentak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan Belanja Daerah pada 19 kabupaten/kota berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDRB di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi R^2

Dari Tabel 3 dilihat bahwa nilai Adjusted R-square sebesar 0.998970. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pajak Daerah, dan Belanja Daerah terhadap PDRB dalam penelitian ini sebesar 99,89% dan $1 - 0.998970 = 0,00103$ yang berarti 0,10% lainnya dipengaruhi diluar variabel ini.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap PPDRB

Berdasarkan hasil penelitian, variabel dana penyaluran umum yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menunjukkan bahwa peningkatan dana penyaluran umum menyebabkan penurunan PDRB. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Dana Alokasi Umum di Sumbar mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap PDRB karena Dana Alokasi Umum yang ditransfer dari pusat ke daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk meningkatkan PDRB. Dampak dana alokasi khusus terhadap PDRB.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi khusus akan meningkatkan PDRB Sumbar. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap GRP kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Secara teori, Dana Alokasi Khusus meningkatkan PDRB karena bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik di

daerah dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar fokus pada Dana Alokasi Khusus untuk mempengaruhi PDRB. Dampak pajak daerah terhadap PDRB.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PDRB

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan variabel Pajak Daerah yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Menandakan bahwa Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan PDRB di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Pajak Daerah meningkatkan PDRB di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat karena Pajak Daerah merupakan kemandirian suatu daerah dan pajak daerah berasal dari daerah itu sendiri sehingga dapat membiayai pembangunan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap PDRB

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan variabel Belanja Daerah yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Menandakan bahwa Belanja Daerah tidak mempengaruhi PDRB di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Belanja daerah di Sumatera Barat tidak berpengaruh diikasikan karena beberapa faktor faktor lain seperti investasi, konsumsi rumah tangga, dan ekspor-impor memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PDRB Sumatera Barat dibandingkan dengan belanja daerah.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara parsial Dana Alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat, meningkat Dana Alokasi Umum akan menurunkan tingkat PDRB di Sumatera Barat.
2. Secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat, meningkat Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan tingkat PDRB di Sumatera Barat.
3. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat, meningkat Pajak Daerah akan meningkatkan tingkat PDRB di Sumatera Barat.
4. Secara parsial Belanja Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat, bahwa Belanja daerah tidak berpengaruh di Sumatera Barat.
5. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan PDRB. Salah satunya dengan mengoptimalkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan Belanja daerah agar lebih ditingkatkan lagi untuk meningkatkan PDRB di Sumatera Barat.
2. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat harus bisa merealisasikan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan Belanja daerah dengan baik, agar

perekonomian di Sumatera Barat Stabil dan kesejahteraan Masyarakat meningkat

3. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian terhadap PDRB. Ada banyak faktor mempengaruhi PDRB. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PDRB.

Daftar Pustaka

- Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5).
- Amin, F. (2019) *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Indonesia: UB Press.
- Amrie, M. Al, Nur, A. A., & Ramadhani, A. (2016). Pengaruh Belanja Daerah Serta Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara. *Jramb*, 2(2), 33–50. <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/2u5ag>
- Astutia, W., Rahmawati, O. D. N., Prasetyoc, W. M., Dewi, A. V. S., Akbar, S., & Nandiwardhanae. (2024). Jurnal JEMATANSI (Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Akuntansi). *Jurnal JEMATANSI (Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Akuntansi)*, 2(1), 1–10.
- Claudia Salindeho. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana ALokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(3), 705–716.

- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Dewi Ratnasari, Jacelyin, & Louis, K. (2022). Analisa Pendapatan Nasional Pada Kota Batam Di Tahun 2018,2019 dan 2020. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1. www.aging-us.com
- Fathiyah, F., Sukmana, A., & Majid, H. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.236>
- Fitriani, Y., & Hendaris, R. B. (2023). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah*.
- Hanif Fuady, & Weriantoni. (2023). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Belanja Modal di KABUPATEN Solok Selatan Tahun 2006-2021*. 1(1), 80–91.
- Hartitik, T. (2014). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011*.
- Hidayat, W. S., & Santosa, B. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat 2010 – 2015. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 5(1), 25–30. <https://doi.org/10.25105/pdk.v5i1.6421>
- Islami, B. K., & Nababan, B. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor 2010-2016. *Jurismata*, 2(1), 2656–2692.
- Karina, F. T. (2019). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017*. Universitas Islam Indonesia.
- Liow, maria omega, Naukoko, A., & Wensy, R. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2), 140.
- Made, N., Sari, Y., Agung, A., & Suarjaya, G. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah dan Alokasi Umum Dana (DAU) Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah di Provinsi Bali* Machine Translated by Google. 2017, 379–386.
- Mamuka, V., & Elim, I. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 646–655.
- Mina, M., & Ratna, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 39. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i1.3200>
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2, 153–169.
- Mokoginta, A., Engka, D., & Maramis, M. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamubagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(3), 284–303.
- Mudji, A., & Taripar, W. (2018). Analisa Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Malang. *PANGRIPTA Jurnal Ilmiah*, 1(1), 35–46. <https://jurnalpangripta.malangkota.go.id/index.php/PANGRIPTA/article/download/8/5>
- Murtala, M., & Iskandar, I. (2020). Analisis Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 92–101. <https://doi.org/10.22373/jep.v10i2.41>
- Murti, A. F. R., Tan, S., & Zulfanetti. (2021). *Pengaruh Pad , Dau , Dak , Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Dan Hubungannya dengan Kemiskinan di Kota Jambi*. 4(2), 12–31.
- Mutiara, D. J. (2015). *Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Di Propinsi Kalimantan Timur*. 4(1). <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/2u5ag>

- Naibaho, F., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Effectiveness and Contribution of Hotel Tax on Local Revenue (Pad). *105 Jurnal EMBA*, 9(3), 105–112.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/34600>
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 2011–2015.
- Nooraini, A., & Syarifudin, A. Y. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2), 89–104.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>
- Nugraha, A. R., & Soebagyo, D. (2021). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2021. *13(2)*, 662–668.
http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/94163%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/94163/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Philippus, A., & Ghetta, K. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. *16(1)*, 104–135.
- Prasetyani, D., & Sumardi. (2020). *Analisis Produk Domestik Regional Bruto* (1st ed.). CV. Djiwa Amarta Press.
- Putra, I., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 1.
<https://doi.org/10.29103/jeru.v3i3.3583>
- Putri, R. A., Zamzami, Z., & Rahmadi, S. (2021). Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 107–122.
<https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.12858>
- Rahmitasari, A. N., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1–23.
- Ramadhan, M., & Syahidin, S. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)*, 2(2), 1–10.
- Reza, M., & Sopiana, Y. (2023). Analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Muhammad. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(1), 31–41.
- Rhamedia, H. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Barat Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan belanja Daerah sebagai Pemediasi. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(3), 1–11.
<https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i3.170>
- Sari, C. P. M. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto di Provinsi Aceh Periode 2013-2017. *01*, 53–57.
- Sembiring, E. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition Journal)*, 1(2), 160–170.
- Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
<http://ejournal.lmiimedan.net>
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63.
- Suranto. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan (Dbh, Dau, & Dak) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Sulawesi Selatan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 53–67.
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.348>
- Syahidin, & Abd. Jalil, M. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di

Kabupaten Aceh Tengah. 2(1), 1–15.

Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomidan Keuangan Daerah, Vol.19 No.(7)*, 1–11.

Yuswara, B. Y. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dan Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.

